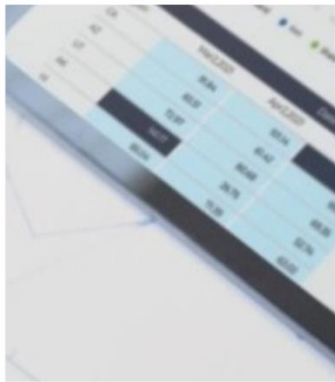
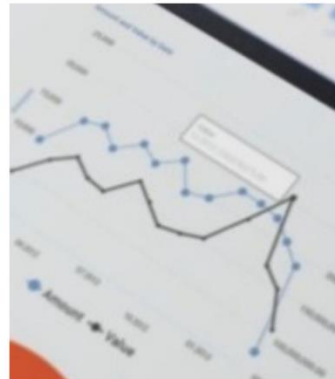
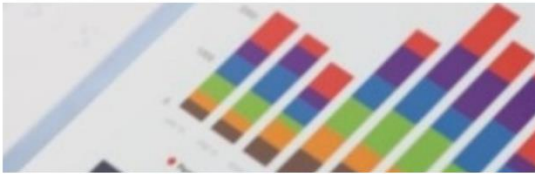
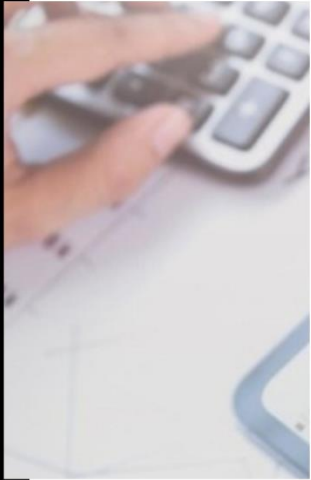


# KINERJA BPOM DALAM ANGKA

**TRIWULAN III 2022**



**BADAN POM**



**KINERJA BPOM  
DALAM ANGKA TRIWULAN III  
TAHUN 2022**

# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standarisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 135.335 NIE, pemeriksaan terhadap 27.918 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 56.141 sampel, 209 perkara, dan 389 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, 29 November 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Penny K. Lukito'.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
HIGHLIGHT .....	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan .....	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan .....	10
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman .....	12
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan .....	14
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan .....	15
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	16
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik .....	24
VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan .....	28
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	31
X. Kerjasama Internasional .....	34
XI. Sumber Daya Manusia .....	37
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan III 2022.....	37
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM .....	38
PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan .....	5
Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan .....	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan .....	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan .....	9
Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan .....	10
Gambar 9. Jumlah Kegiatan Operasi Intelijen Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan III 2022.....	10
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan III 2022 .....	11
Gambar 11. Profil Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia s.d Triwulan III 2022..	11
Gambar 12. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi.....	16
Gambar 13. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media.....	17
Gambar 14. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan III 2022 .....	18
Gambar 15. <i>Engagement</i> Media Sosial Badan POM.....	19
Gambar 16. <i>Top engagement content</i> terkait Badan POM pada <i>platform</i> Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan III 2022 .....	19
Gambar 17. Tren Tonasi Pemberitaan.....	20
Gambar 18. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan III 2022.....	20
Gambar 19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2022 .....	21
Gambar 20. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi.....	22
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media.....	23
Gambar 22. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi .....	23
Gambar 23. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM .....	24
Gambar 24. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode.....	25
Gambar 25. Aktivitas pada BPOM Mobile.....	26
Gambar 26. Realisasi Anggaran s.d Triwulan III 2022.....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) .....	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) .....	7
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping .....	9



**BADAN POM**

# **HIGHLIGHT**

**S.D TRIWULAN III**

## Workshop Pangan Olahan Tingkatkan Potensi UMKM di Papua Barat

Sorong, Rabu (13/07/2022)



Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pangan olahan di Papua Barat menjadi fokus penting Badan POM. Keterbatasan sumber daya di Timur Indonesia tersebut membuat Badan POM hadir lebih awal memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito berkesempatan membuka secara langsung Workshop Pendampingan UMKM Pangan Olahan melalui Layanan Publik secara Online.

Keberpihakan Badan POM pada pelaku UMKM terus diwujudkan melalui asistensi regulatori serta pendampingan agar pelaku usaha memenuhi standar dalam menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Melalui kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia, Balai Besar POM di Manokwari dan Loka POM di Kabupaten Sorong hadir merespons kebutuhan masyarakat dan potensi UMKM di Papua Barat.

## Badan POM Dorong Peluang Joint Ventures melalui Business Forum on Pharmaceutical and Medical Device Products

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menghadiri kegiatan “*Business Forum on Pharmaceutical and Medical Device Products*”. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi dan ekspor pada produksi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM menjelaskan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang joint ventures yang berfokus pada produksi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Pertemuan ini sekaligus bagian dari implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan POM dengan MOHAP di bidang obat dan vaksin.

Jakarta, Selasa (19/07/2022)



## BPOM kawal kualitas dan keamanan 3M hingga sampai ke konsumen

Medan, Kamis (18/08/2022)



Dalam rangkaian kunjungan kerja, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito beserta jajarannya menyambangi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau kesiapan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) agar PPKS dapat mandiri dan mampu menghasilkan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI yang telah menyetujui program pembangunan Minyak Makan Merah (3M) berbasis koperasi guna memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit bagi rakyat. “Sesuai hasil Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Produk Turunan Kepala Sawit 18 Juli 2022, Presiden RI menyetujui program pembangunan 3M sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit bagi rakyat.

## Sinergi Triple Helix Bangun Ekosistem Kemandirian Obat dan Vaksin dalam Negeri

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan industri farmasi terhadap tahapan dan regulasi pengembangan obat, BPOM menyelenggarakan “Lokakarya Pemanfaatan Teknologi Pengembangan Obat dan Vaksin COVID-19 untuk Mendukung Pembangunan Ekosistem Kemandirian Obat dan Vaksin Dalam Negeri”. Forum ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan strategis BPOM dalam membangun Ekosistem Kemandirian Obat dan Vaksin dalam Negeri, yang sebelumnya telah diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) Kemandirian Bahan Baku Obat, Obat, dan Produk Biologi.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito dalam sambutannya menekankan pentingnya pengembangan inovasi sebagai kunci terwujudnya kemandirian farmasi nasional dan ketahanan kesehatan nasional. Ia mengatakan bahwa produk hasil riset Indonesia harus difasilitasi untuk dapat dikomersialisasi dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, proses hilirisasi yang efektif memerlukan pula riset inovatif yang valid dan mampu menjawab kebutuhan pasar.

Jakarta, Jumat (26/08/2022)



## Regionalisasi Laboratorium Berkelanjutan Untuk Pengujian Obat dan Makanan Aman

Padang, Jumat (09/09/2022)



Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengujian dan kualitas laboratorium secara berkesinambungan dan berkelanjutan, BPOM melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Regionalisasi Laboratorium Triwulan II. Ini merupakan monev yang perdana dilakukan secara komprehensif dan langsung melibatkan unit kerja terkait di BPOM, juga Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, Lila Yanwar dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatra Barat, Nazwir.

Monev regionalisasi laboratorium dilakukan terhadap 6 (enam) komponen, yaitu perencanaan sampling dan pengujian; produktivitas (timeline, turn around time, dan produktivitas pengujian); kualitas anggaran; kapasitas (jenis dan jumlah pengujian spesifik serta kapasitas instrumen); responsivitas (kecepatan tindak lanjut dan mengatasi kendala); dan sustainabilitas (peningkatan kompetensi spesifik dan jumlah alat terkalibrasi).

## Industri Vaksin Dalam Negeri Terus Berkembang, BPOM Terbitkan EUA Vaksin Indovac dan AWcorna

BPOM kembali terbitkan *Emergency Use Authorization* (EUA) atau Izin Penggunaan Darurat untuk dua vaksin COVID-19 pada 24 September 2022. Vaksin pertama adalah Vaksin Indovac buatan PT Bio Farma yang bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, USA dan Vaksin AWcorna yang didaftarkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia dan dikembangkan oleh Abogen-Yuxi Walvax, China.

Penyerahan EUA diberikan secara langsung oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito kepada Direktur Operasi PT Bio Farma, M. Rahman Roestan dan Direktur Utama PT Etana Biotechnologies Indonesia, Nathan Tirtana. Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penjelasan pers terkait penerbitan EUA tersebut.

Jakarta, Jumat (30/09/2022)





**BADAN POM**

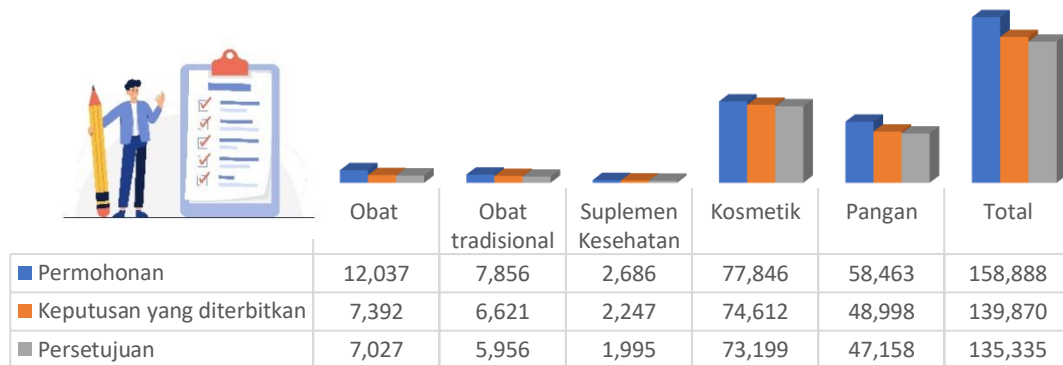
**HASIL KEGIATAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
SD TRIWULAN III**

## I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

### Pengawasan Pre-market

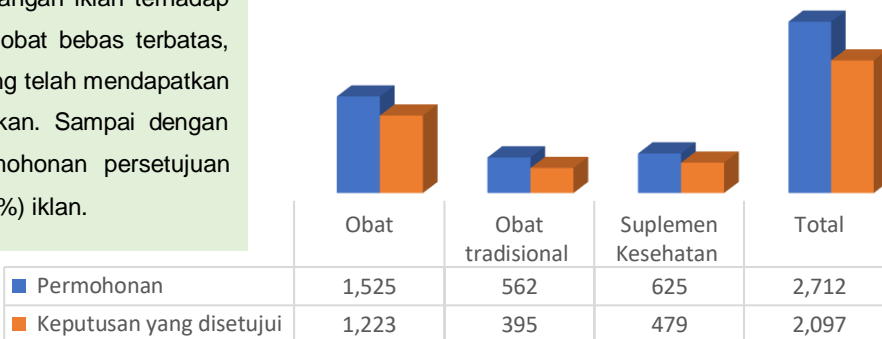
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, telah diterbitkan 139.870 keputusan dan 135.335 persetujuan izin edar dari 158.888 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, dari 2.712 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.097 (77,32 %) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

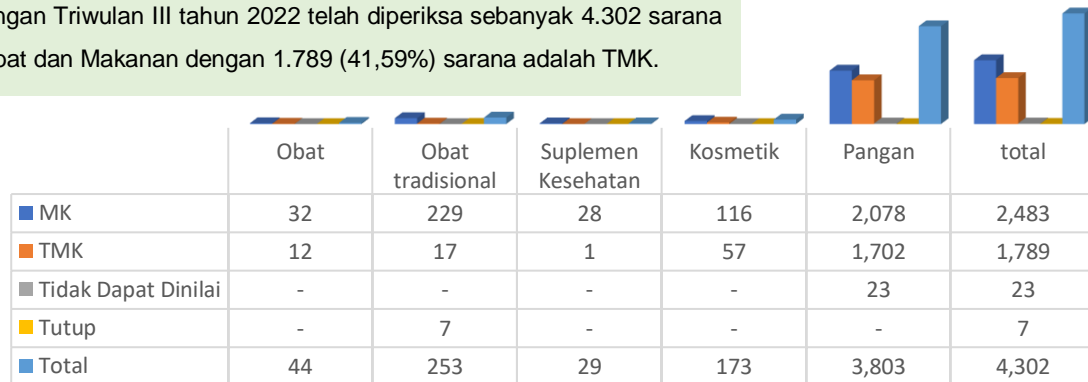
## Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

### Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

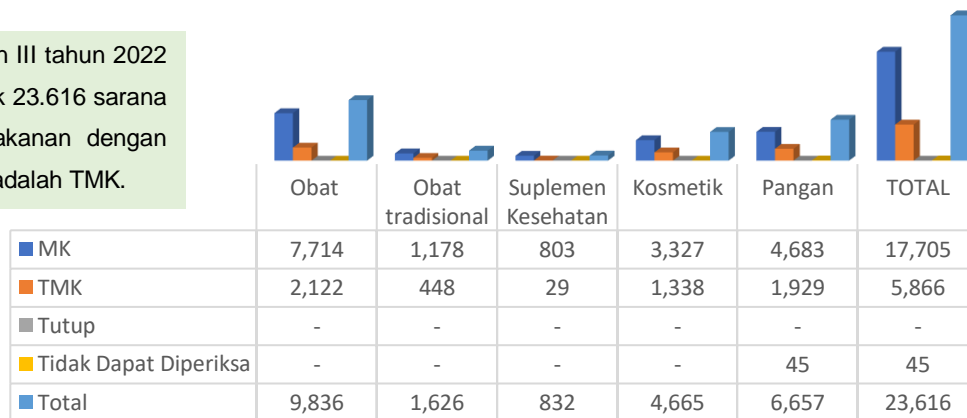
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 4.302 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 1.789 (41,59%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 23.616 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 5.866 (24,84%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan  
 TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan  
 MK : Memenuhi Ketentuan



## Sampling dan Pengujian Laboratorium

### a. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Targeted	2.567	1	16	-	80	2.550	1.974	1.894	80	97	576	1.991
Obat tradisional	Targeted	3.172	1	-	-	352	3.171	2.649	2.147	502	503	522	2.650
kuasi	Targeted	149	-	-	-	21	149	80	67	13	13	69	80
Suplemen Kesehatan	Targeted	805	-	-	-	49	805	680	588	92	92	125	680
Kosmetik	Targeted	6.301	-	-	-	1.180	6.301	5.212	4.148	1.064	1.064	1.089	5.212
Rokok	Targeted	160	-	-	-	9	160	15	11	4	4	145	15
Pangan	Targeted	4.291	-	-	-	490	4.291	3.380	2.921	459	459	911	3.380

**Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Targeted*)**

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, dari 17.445 sampel *targeted* yang disampling terdapat 14.008 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 2.214 (15,81%) sampel tidak memenuhi syarat.

### b. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	11355	0	2	0	425	11.353	9.202	8933	269	271	2.151	9.204
Obat tradisional	Random	7597	13	0	0	896	7.584	6.419	5373	1.046	1.059	1.165	6.432
kuasi	Random	676	0	0	0	47	676	461	419	42	42	215	461
Suplemen Kesehatan	Random	2071	0	0	0	156	2.071	1.694	1461	233	233	377	1.694
Kosmetik	Random	15064	37	2	0	2.644	15.025	12.733	10356	2.377	2.416	2.292	12.772
Pangan	Random	14455	6	3	9	1.320	14.437	11.552	10198	1.354	1.372	2.885	11.570

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan III 2022

**Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Random*)**

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, dari 51.218 sampel *random* yang disampling terdapat 42.133 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 5.321 (12,63%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

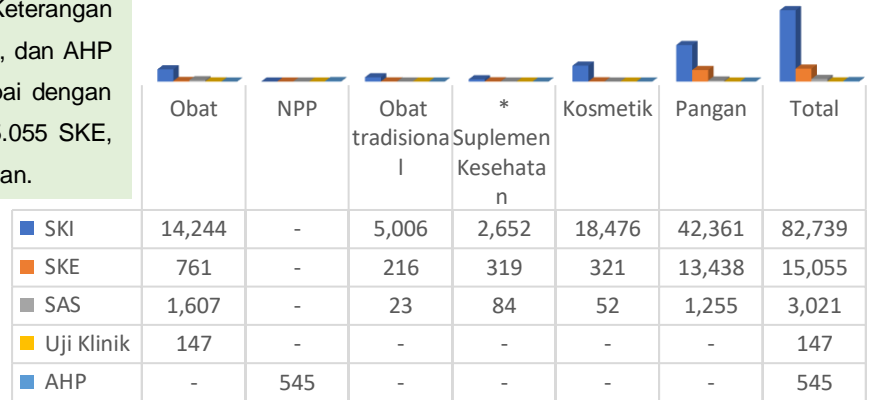
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

## Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah diterbitkan 82.739 SKI, 15.055 SKE, 3.021 SAS, 147 Uji Klinik, dan 545 AHP Obat dan Makanan.

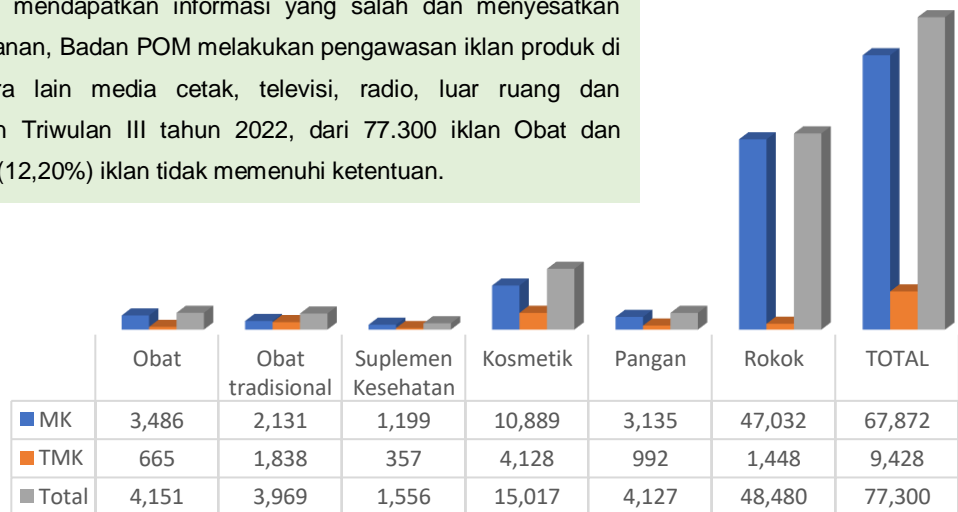


Keterangan: \* Termasuk Kuasi

Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

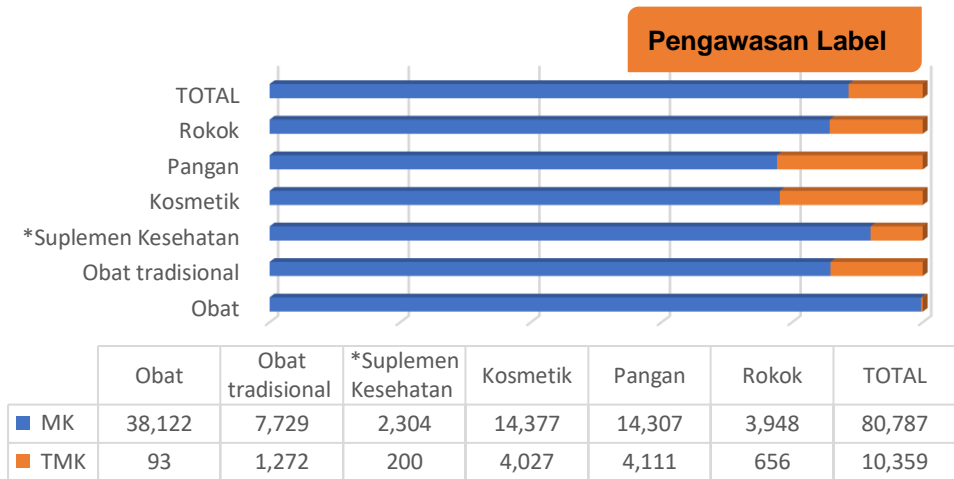
## Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brostur. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, dari 77.300 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 9.428 (12,20%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, dari 91.146 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 10.359 atau sekitar 11,37% label tidak memenuhi ketentuan.



\* Termasuk Kuasi

**Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan**

**Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)**



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanjutt	%
<b>Obat</b>	7.488	5654	75,51
<b>Obat Tradisional</b>	22	22	100,00
<b>Suplemen Kesehatan</b>	33	33	100,00
<b>Kosmetik</b>	264	256	96,97

**Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping**

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

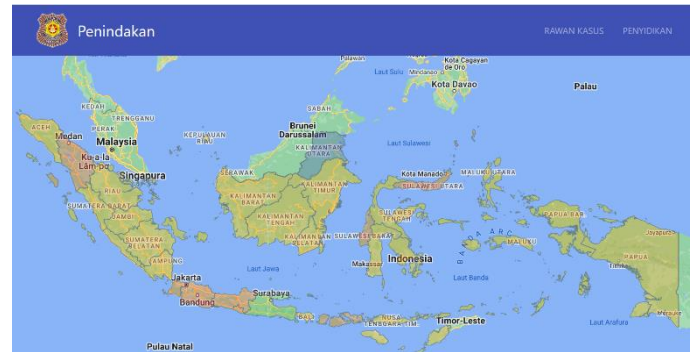
- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

## II. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

### 1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

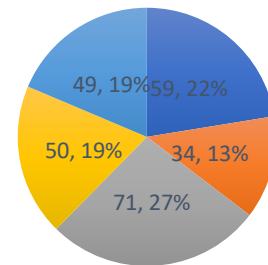
Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan peta rawan kasus yang aktual sebanyak 2792 kasus yang terdiri dari 711 kasus terkait obat, 604 kasus terkait obat tradisional, 49 kasus suplemen kesehatan, 1107 kasus terkait kosmetik dan 321 kasus terkait komoditi pangan. Data rawan kasus Obat dan Makanan tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo dengan jumlah total 336 kasus.



**Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan**

### 2. Hasil Operasi Intelijen

Masih maraknya temuan Obat dan Makanan ilegal mendorong peningkatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui kegiatan/operasi intelijen. Sampai dengan Triwulan III kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan temuan kasus yang terkait komoditi obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Seluruh kasus yang ditemukan selanjutnya ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi maupun *projusticia*.



■ Obat ■ NAPPZA ■ OT & SK ■ Kosmetik ■ Pangan

**Gambar 9. Jumlah Kegiatan Operasi Intelijen Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan III 2022**

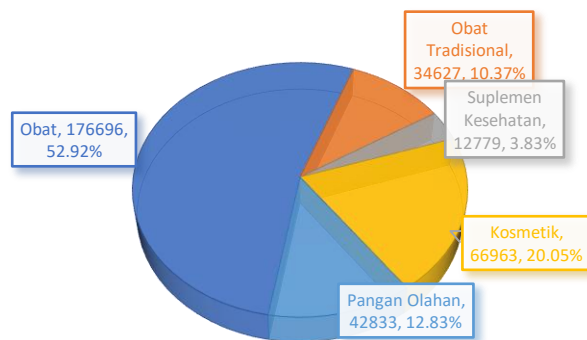
### 3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2022, ditemukan sebanyak 333.898 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

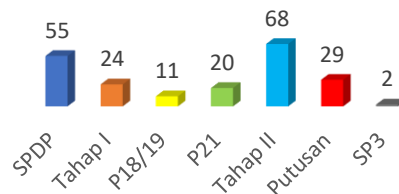
### 4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 209 perkara. Sebanyak 55 perkara masih dalam tahap SPDP, 24 perkara pada tahap I, 11 perkara pada tahap P18/19, 20 perkara pada tahap P21, 68 perkara pada tahap II, 29 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan dan 2 perkara diterbitkan SP3.



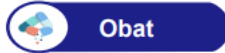
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan III 2022



Gambar 11. Profil Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia s.d Triwulan III 2022

### III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Pada tahun 2022 terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan selama triwulan III sebagai berikut:

1. Standar Obat Non Kompendial (100%).
2. Standar Mutu Produk Biologi dan Produk Radiofarmaka (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelulusan Bets/Lot Release Vaksin dan Produk Darah (71,43%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Risiko Keberadaan Nitrosamin dalam Obat dan Bahan Obat (85,71%).
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Produk Inhaler dan Nasal (28,57%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Spesifikasi Kemasan Obat (28,57%).
7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatorium Obat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia Edisi 4 (100%).
8. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (100%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
10. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Produk Tembakau (48,86%).
11. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian (42,86%).



#### Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 9 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 9 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan III:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB secara Bertahap (100%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Pratinik Obat Tradisional (Lampiran) (80%).

3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (80%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (80%).
5. Pedoman Uji Klinik Suplemen Kesehatan (90%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (80%).
7. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (60%).
8. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (60%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Parfum Isi Ulang (90%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 130 kajian. Pada triwulan III telah diselesaikan sebanyak 73 kajian yang terdiri dari 18 kajian di bidang Obat Tradisional, 46 kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 9 kajian di bidang Kosmetik. Dari 73 kajian yang telah diselesaikan tersebut, terdapat satu kajian yang diselesaikan lebih dari 85 Hari Kerja. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.



### Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan III sebagai berikut:

1. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 (Lampiran III - V) (40%).
2. Penyusunan *Code of Practices* untuk mereduksi 3-monochloropropane-1,2- diol esters (3-MCPDE) dan glycidyl esters (GE) dalam Minyak Goreng Sawit (40%).
3. Penyusunan Pedoman Mitigasi Risiko Senyawa Etilen Oksida, 2,6-diisopropylNaphtalene dan 9,10-Antrakuinon dalam Pangan Olahan (60%)
4. Penyusunan Pedoman Pengkajian Bahan Tambahan Pangan (60%).
5. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan (50%).
6. Penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (70%).

7. Penyusunan Pedoman Iklan Pangan Olahan (60%).
8. Penyusunan Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (68,57%).
9. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (42,86%).
10. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Pangan Siap Saji Terkemas) (50%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Jenis Mikroorganisme yang Digunakan pada Pangan Olahan (78%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Selama triwulan III telah diselesaikan 126 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

#### **IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan**

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2022 dengan progres triwulan III sebagai berikut:

1. Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 (78%).
2. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan *System Dynamic* (70%).
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC) (95%).
4. Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar (60%).
5. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 (75%).
6. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 (90%).
7. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (90%).
8. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022 (72%).
9. Evaluasi Penerapan 2D *Barcode* dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan (100%).

10. Kajian Polutan Farmasi Pada Air Baku Untuk Minum dan Produksi Obat dan Makanan Tahun 2022 (62%).
11. Analisis Senyawa Karsinogenik pada Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan (77%).

## V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

### 1. Metode Analisis (MA) yang dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan

Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan pengembangan 200 MA. Sampai dengan triwulan III, telah dikembangkan 123 judul MA.

### 2. Baku Pembanding yang dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Pada triwulan III tahun 2022 telah dikembangkan 77 baku pembanding.

### 3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel Obat dan Makanan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, terdapat 470 sampel yang diterima oleh laboratorium PPPOMN. Sebanyak 409 sampel telah selesai uji dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan *timeline*.

### 4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, telah dilakukan kalibrasi terhadap 2.452 peralatan laboratorium.

## 5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian.

Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 10 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Badan POM telah berpartisipasi dalam 3 jejaring yaitu Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee (ACTLC) dan ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives.

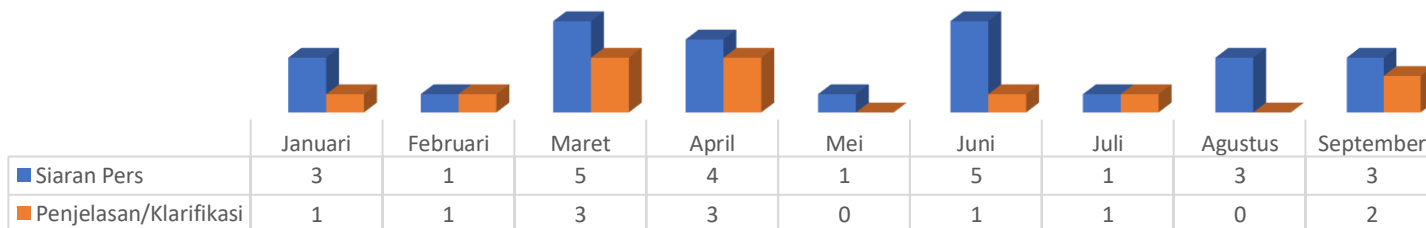
## 6. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

Di masa pandemi, Badan POM berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen Covid-19 yang dilakukan di Laboratorium Biohazard.

Pada tahun 2022, laboratorium biohazard Badan POM bergabung dalam jejaring pengujian Whole Genome Sequencing (WGS), di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus Covid-19. Dari 2.063 spesimen yang diuji WGS selama triwulan III, sebagian besar sampel merupakan varian Omicron.

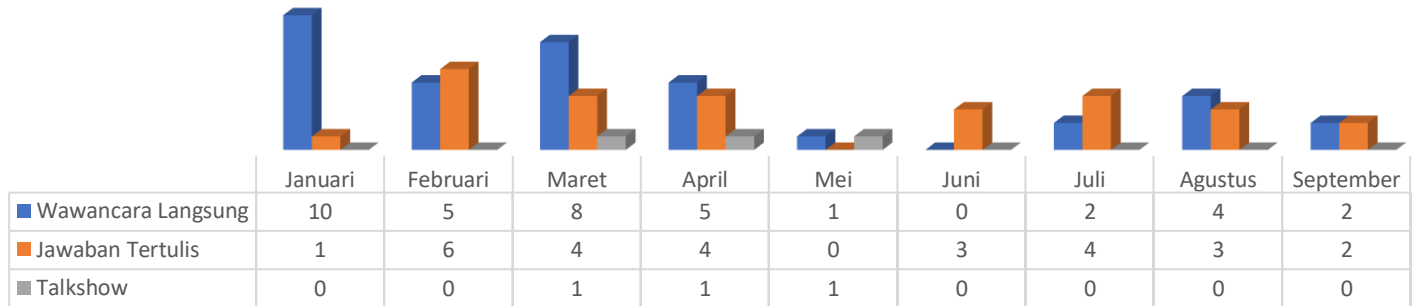
## VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Hingga triwulan III tahun 2022, Badan POM telah menerbitkan 26 siaran pers dan 12 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 5 siaran pers, sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Maret yaitu 3 klarifikasi.



**Gambar 12. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi**

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Namun sepanjang triwulan III tahun 2022, topik yang paling sering dibahas dalam siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berasal dari komoditas pangan olahan. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.



**Gambar 13. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media**

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 37 wawancara langsung, 27 jawaban tertulis dan 3 talkshow.

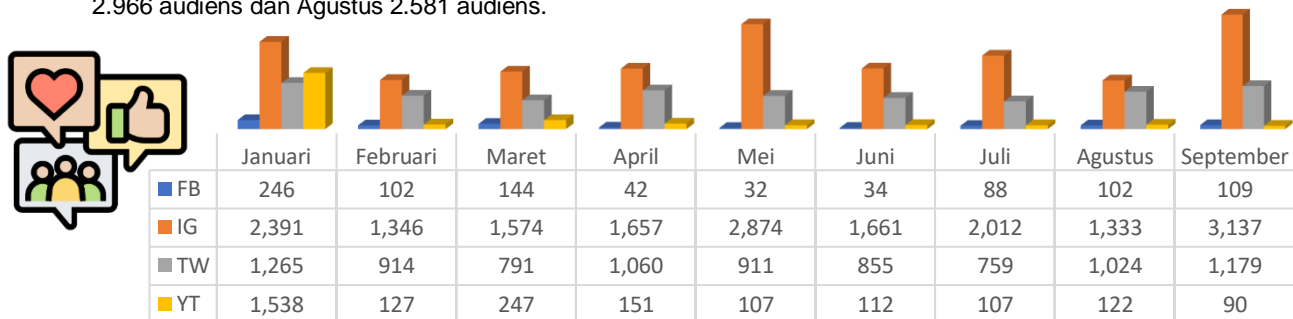
Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat sudah 99 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2022. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 153 kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Sebagai informasi, tidak seluruh peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual.

Pada triwulan III tahun 2022, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata 3-4 unggahan per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 666 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas

tertinggi kedua adalah Instagram dengan 356 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 149 unggahan, serta Youtube sebanyak 28 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan periode Januari sampai dengan September 2022 di berbagai platform adalah 3.021 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 357 unggahan di bulan Januari, 224 unggahan di bulan Februari, 372 unggahan di bulan Maret, 357 unggahan di bulan April, 231 unggahan di bulan Mei, 281 unggahan di bulan Juni, 315 unggahan di bulan Juli, 543 unggahan di bulan Agustus dan 341 unggahan di bulan September.

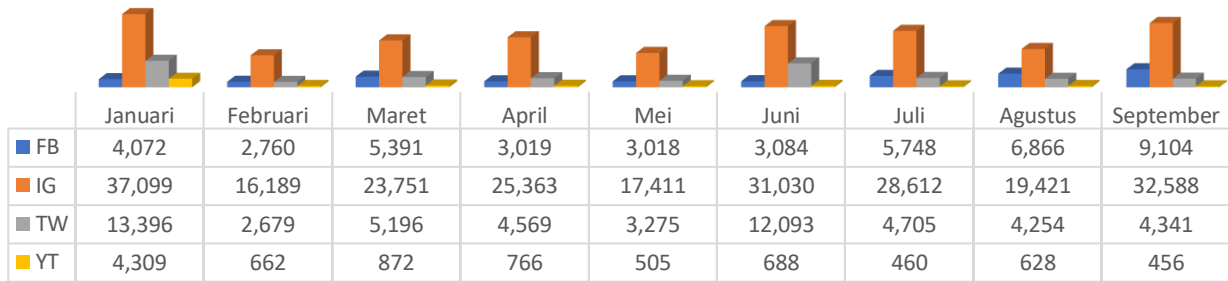
Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung terhadap 4 platform media sosial terpantau stabil. Instagram merupakan platform dengan total audiens/khalayak/pengunjung tertinggi pada triwulan III dengan jumlah audiens/khalayak/pengunjung sebanyak 6.482 audiens, sementara di peringkat kedua ada platform Twitter dengan jumlah 2.962 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 319 audiens dan Facebook dengan 299 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada September, yaitu sebesar 4.515 audiens, disusul Juli 2.966 audiens dan Agustus 2.581 audiens.



**Gambar 14. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan III 2022**



Pada triwulan III, engagement pada setiap platform cenderung fluktuatif. Engagement tertinggi hanya terjadi pada platform Instagram pada bulan September dengan jumlah 46.489, diikuti bulan Juli sebesar 39.525, dan Agustus sebesar 31.169. Pertumbuhan jumlah engagement terlihat fluktuatif di 4 platform tersebut. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan September karena adanya konten waspada peredaran vitamin C injeksi illegal, penyalahgunaan obat resep dan OTC, klarifikasi penarikan produk mie instan asal Indonesia di Hongkong, vaksin dengue (Qdenga) yang mendapatkan izin edar BPOM. Sedangkan rendahnya engagement pada bulan Agustus terjadi kemungkinan karena kurangnya isu-isu yang menarik perhatian audiens pada bulan tersebut.



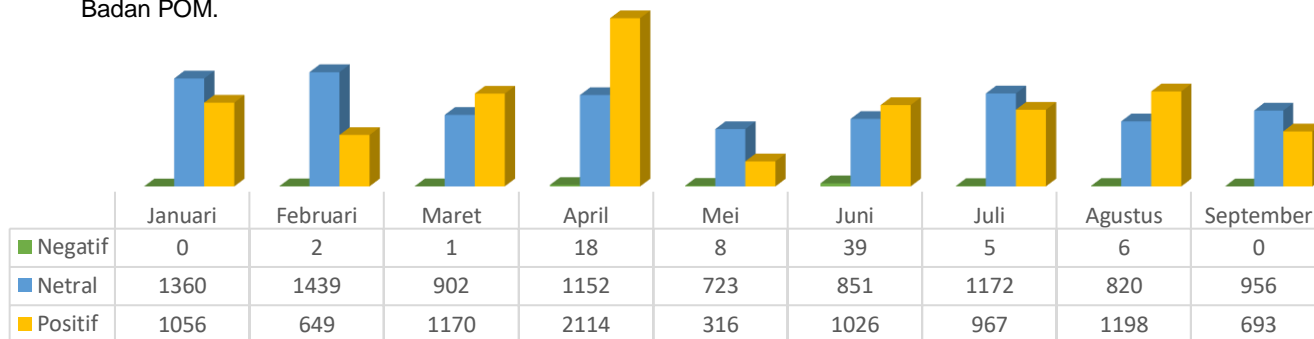
**Gambar 15. Engagement Media Sosial Badan POM**

Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut :



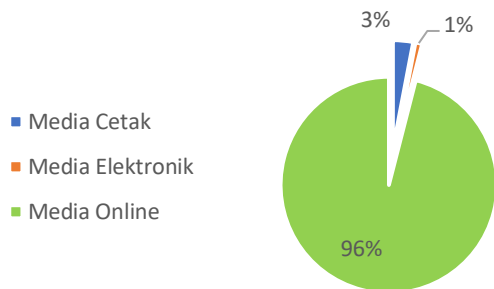
**Gambar 16. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan III 2022**

Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sampai dengan triwulan III terdiri dari 18.843 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita bertonasi netral sebanyak 9.375 pemberitaan dan berita bertonasi positif sebanyak 9.389 pemberitaan serta berita bertonasi negatif sebanyak 79 pemberitaan. Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak mengutip Badan POM.



**Gambar 17. Tren Tonasi Pemberitaan**

Jika dilihat pada grafik di atas, berita positif terbanyak terdapat pada April dan berita positif mendominasi pada Maret, Juni dan Agustus. Sedangkan berita netral mendominasi pada Januari, Februari, dan Mei. Tingginya pemberitaan positif pada April berkaitan dengan intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan, pernyataan BPOM mengenai penarikan Kinder Surprise, sedangkan pada Agustus berkaitan dengan penerbitan EUA Pfizer sebagai vaksin booster untuk usia 16-18 tahun, uji klinis vaksin Indovac dan Inavac.



Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Obat dan Makanan lebih banyak terdapat di media online (96%), sedangkan media cetak sebanyak 3% dan media elektronik 1%.

**Gambar 18. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Sampai Dengan Triwulan III 2022**

Tahun 2022 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan di bulan Januari dan Februari didominasi oleh vaksin Covid-19. Selanjutnya pada bulan Maret, Badan POM mengangkat isu penemuan produk kopi dan jamu Berbahas Kimia Obat (BKO). Pada bulan April pemberitaan didominasi oleh topik mengenai intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Sedangkan isu mengenai pelabelan BPA free mendominasi pemberitaan pada Mei dan Juni. Pada triwulan III, topik terkait vaksin dan obat Covid-19 yang memperoleh EUA dari Badan POM kembali muncul. Selain itu topik pemberitaan yang cukup dominan terkait respon BPOM terkait berbagai penarikan produk di luar negeri.

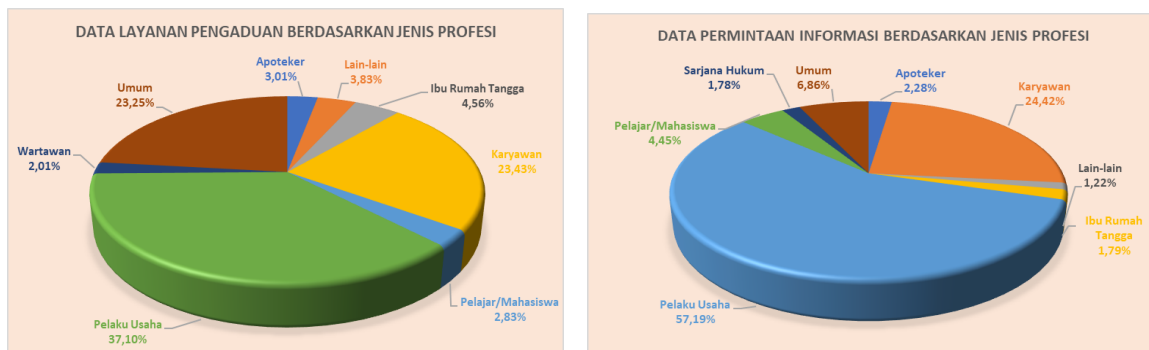


**Gambar 19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2022**

Keterangan: \*KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi

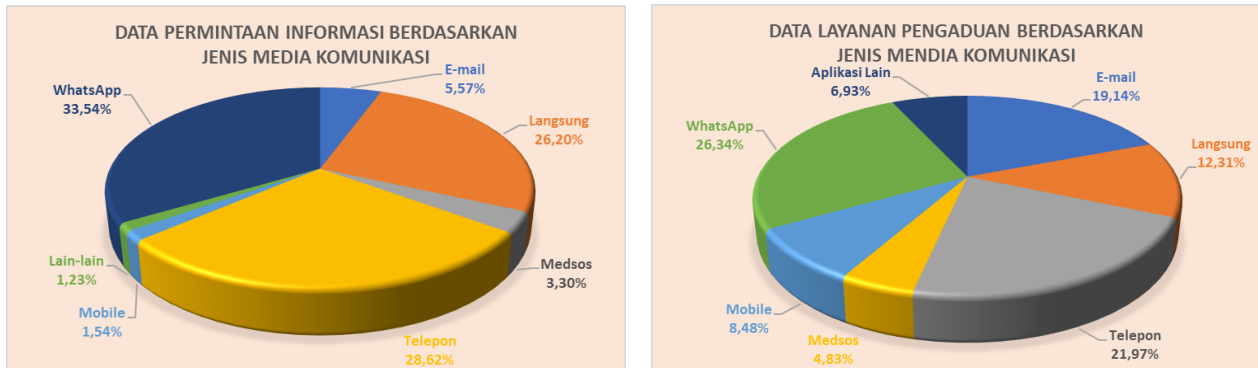
Sampai dengan triwulan III tahun 2022, terdapat 48 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) namun 2 permintaan tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap. Topik permintaan informasi tersebut mengenai peraturan terkait Obat dan Makanan, vaksin Covid-19, nomor izin edar, data obat palsu, dan penarikan obat ilegal. Dari 46 permintaan informasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM, 30 (65%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 11 (24%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 5 (11%) permintaan informasi yang ditolak dengan alasan ada sebagian informasi yang termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan dan merupakan wewenang instansi lain). Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja).

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-September tahun 2022, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 38.703 layanan, terdiri dari 37.606 (97,17%) layanan permintaan informasi dan 1.097 (2,83%%) layanan pengaduan.



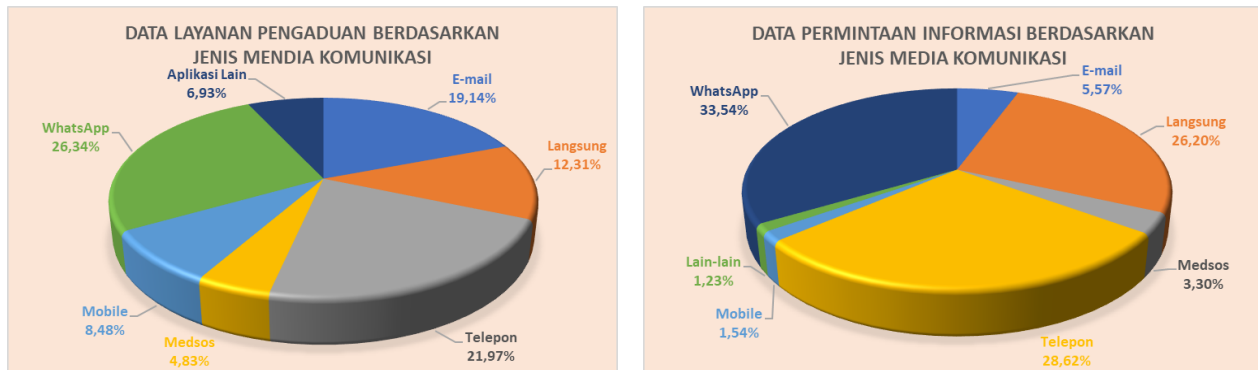
**Gambar 20. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi**

**Profil profesi** masyarakat yang mengakses layanan **informasi** sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 21.507 (57,19%) layanan dan karyawan sebanyak 9.185 (24,42%) layanan. Adapun **pengaduan** sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 407 (37,10%) layanan dan karyawan sebanyak 257 (23,43%) layanan.



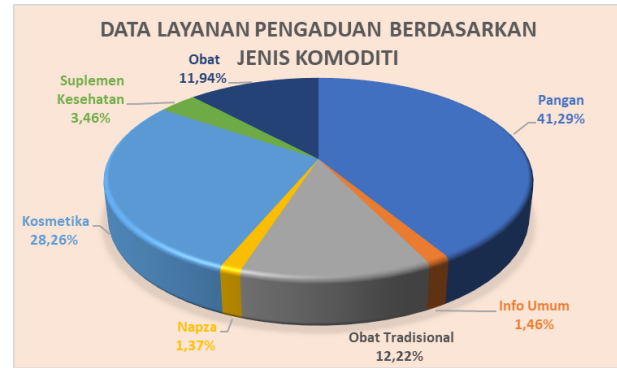
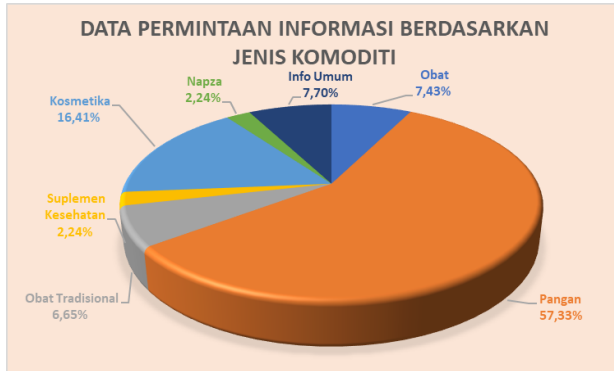
**Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media**

**Media komunikasi** yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan **informasi** yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* sebanyak 12.613 (33,54%) layanan dan telepon sebanyak 10.764 (28,62%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan **pengaduan** yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* sebanyak 289 (26,34%) layanan dan telepon sebanyak 241 (21,97 %).



**Gambar 22. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi**

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 21.560 (57,33%) layanan dan kosmetika sebanyak 6.172 (16,41%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 453 (41,29%) layanan dan kosmetika sebanyak 310 (28,26%) layanan.



**Gambar 23. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM**

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 19.248 (51,18%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 7.615 (20,25%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, proses sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan Surat Keterangan Impor dan Ekspor (SKI/SKE), produk terdaftar, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 516 (47,04%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 182 (16,59%) layanan.

## VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

### 1. Implementasi Tanda Tangan Elektronik

Badan POM yang bekerjasama dengan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) telah mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sejak 2018. TTE di Badan POM telah diimplementasikan terhadap 12 Aplikasi baik layanan publik (dokumen perizinan) dan layanan internal (tata naskah dinas BPOM).

Implementasi TTE saat ini telah dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baik di Pusat maupun UPT. Pada saat ini dilakukan pengembangan implementasi kepada seluruh Pejabat Administrator, Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan unit kerja pusat. Dalam hal menerapkan

TTE untuk seluruh level hingga Sub Koordinator akan menggunakan aplikasi tata persuratan (Aplikasi Srikandi).

## 2. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

### a. Percepatan Implementasi



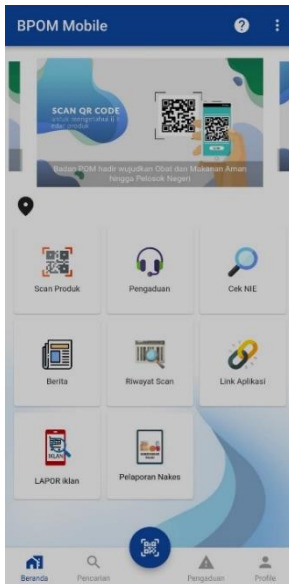
Pengawasan obat dan makanan berbasis digital merupakan salah satu cara dalam meminimalisir pemalsuan obat dan makanan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.

Strategi pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM, antara lain dengan melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka, maupun dengan helpdesk teknis dan substansi. Pelaksanaan desk konsultasi yang telah dilakukan pada Triwulan III terlampir pada gambar berikut.:

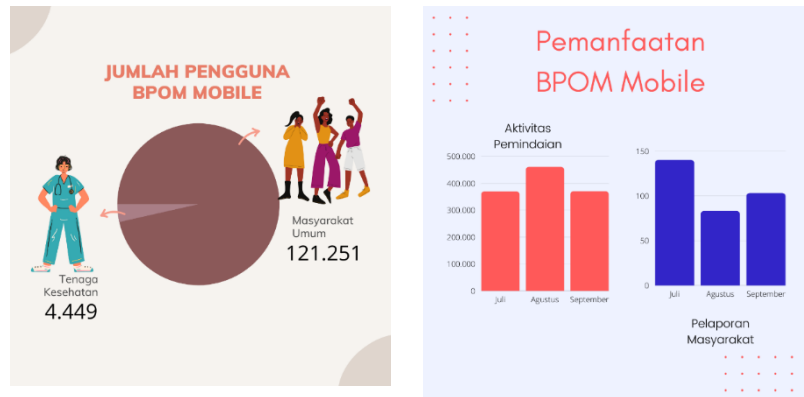


**Gambar 24. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode**

Pencantuman 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan memberikan kesempatan partisipatif seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melakukan pemindaian (scan) 2D barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile, masyarakat dapat memverifikasi keaslian dan legalitas produk. Aplikasi BPOM Mobile dilengkapi menu lainnya yaitu cek NIE produk, pengaduan dan update berita Klarifikasi BPOM. Masyarakat dengan mudah dapat melaporkan temuan produk ataupun pengaduan obat dan makanan dimanapun beradar tanpa harus mendatangi kantor Badan POM. Selain itu, BPOM Mobile wadah mencegah hoax dengan update berita ataupun klarifikasi seputar Obat dan Makanan.



Pada TW III, dilakukan pengembangan berupa penyempurnaan registrasi untuk tenaga kesehatan, dan menu Frequetly Asked questions (FAQ). Aktivitas kebermanfaatn B POM Mobile pada Triwulan III 2022 sebagai berikut:



**Gambar 25. Aktivitas pada B POM Mobile**

### 3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Pada triwulan III ini telah dilakukan beberapa pengembangan dan pemeliharaan SIPT antara lain:

- Pengembangan Update Form SAS dan Antibiotika pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian
- Penyempurnaan fitur di alur pengujian
- Penyempurnaan fitur di admin balai
- Penyempurnaan alur pihak ketiga
- Penambahan fitur upload BAP dan cetak inspeksi

#### **4. Implementasi Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko**

Integrasi Layanan Publik dengan OSS RBA menjadi tuntutan dalam rangka percepatan berusaha. Percepatan Implementasi OSS terus dilakukan secara bertahap dengan terus berupaya agar aplikasi layanan publik Badan POM dapat terintegrasi secara Live.

Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III guna percepatan dalam implementasi Online Single Submission yaitu dengan melaksanakan SIT (System Integration Testing) pada Aplikasi OT, Suplemen Kesehatan (Aplikasi ASROT) sebagai bentuk kesiapan sistem agar dalam implementasi integrasi dengan OSS berjalan dengan baik. Kegiatan lainnya yaitu pertemuan bersama unit teknis layanan publik Badan POM untuk pembahasan dan diskusi tentang tindak lanjut terhadap aplikasi yang sedang dan akan integrasi dengan OSS.

#### **5. Pengembangan SMART POM**

Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut DAK Nonfisik POM, dalam kerangka DAK Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pengalokasian DAK Nonfisik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kegiatan dan untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengalokasian tersebut sesuai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, aplikasi SMARTPOM ini dikembangkan dengan penyesuaian menu DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

Dalam operasional aplikasi SMARTPOM, terdapat beberapa fitur tambahan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022. Pada Triwulan III ini aplikasi SMARTPOM sudah sampai pada tahap Implementasi aplikasi dan telah digunakan oleh user yang bersangkutan dimana selaku user yang melakukan penginputan berasal dari Dinas Kesehatan Penerima DAK Non Fisik 2022. Dalam operasional aplikasi SMARTPOM, terdapat beberapa fitur tambahan di antaranya menu rencana kerja anggaran dimana terdapat submenu usulan RKA dan berita acara yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

## VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, telah ditetapkan 20 (Dua Puluh) Peraturan Badan POM, 54 (Lima Puluh Empat) Keputusan Kepala Badan POM, dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

### 1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



### 3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

### Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022.

### Judul Peraturan Badan POM

8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Badan POM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praktikum Secara In Vivo
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Rumah Sakit
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2022 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi di Wilayah Indonesia
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik Di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel Dan Jaringan Manusia
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional Di Lingkungan Badan POM

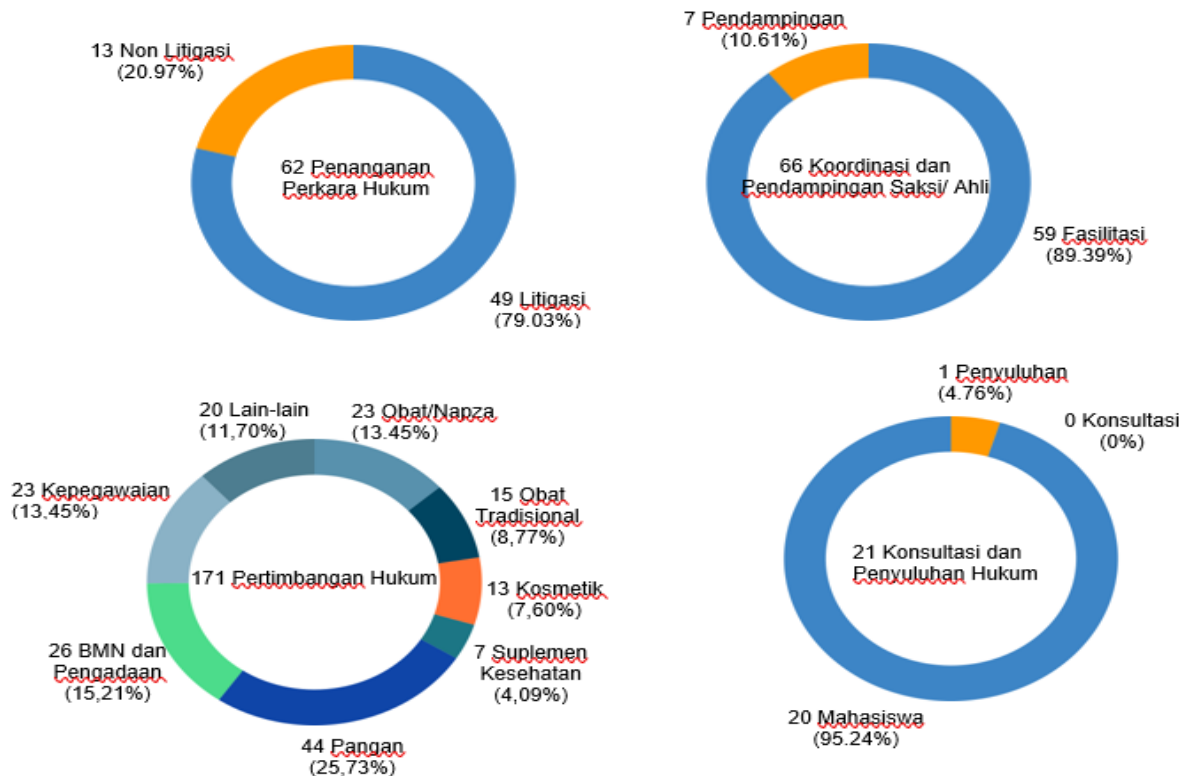
## Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

### Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Jumlah Layanan Advokasi Hukum yang diberikan sejumlah 320 layanan yang terdiri dari:



## **IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

### **1. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di UPT BPOM. Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2021, BPOM menetapkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang telah disampaikan kepada seluruh unit kerja dan diunggah pada subsite [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id). Di samping itu, dalam rangka penataan UPT BPOM telah dilakukan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian PANRB pada tanggal 15 September 2022.

BPOM perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk menilai kemajuan dalam rangka pencapaian rencana aksi pelaksanaan RB BPOM tahun 2021 untuk mewujudkan sasaran RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Melalui rapat koordinasi persiapan evaluasi RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 diharapkan Indeks RB BPOM tahun 2022 dapat meningkat dan melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024, yaitu lebih besar dari 85. Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB dilaksanakan secara daring selama 2 (dua) hari pada tanggal 19-20 September 2022.

### **2. Tata Laksana**

#### **a. Entry Meeting Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM**

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 lebih difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko.

- Aspek kepemimpinan, komitmen dan peran Pimpinan BPOM, Kepala Unit Kerja Pusat, dan Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM sangat menentukan penerapan QMS BPOM secara konsisten di unit organisasinya masing-masing.

- Aspek perencanaan berbasis risiko, implementasinya diintegrasikan dengan pengendalian risiko berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor OT.02.03.2.22.07.22.217 tentang Entry Meeting Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 13 Juli 2022 telah diadakan entry meeting pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan QMS ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Utama selaku Deputy Manajemen Puncak dan dihadiri oleh 104 (seratus empat) yang terdiri dari (tiga puluh satu) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM di Kabupaten/Kota dan perwakilan Lead Auditor dari PT. Sucofindo sebagai pemenang pengadaan jasa konsultansi kegiatan Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan ISO 9001:2015 BPOM secara daring.

**b. Pendampingan Persiapan Dokumen Mutu Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk 2 (dua) Unit Kerja Pusat**

Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang disertifikasi tahun 2022, dilakukan pendampingan secara daring untuk Unit Kerja Pusat dan Loka POM sebanyak 1 bets kegiatan yaitu tanggal 26 Juli 2022 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Tindak lanjut dari hasil pendampingan adalah Unit Kerja Pusat melakukan penyempurnaan dokumen sehingga diharapkan pada pelaksanaan audit seluruh dokumen sudah lengkap.

**c. Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun Anggaran 2022**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan sistem manajemen mutu (quality management system) melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tahun 2022 dilakukan:

- Audit Sertifikasi Stage 1 QMS ISO 9001:2015 berupa audit dokumen (off-site) untuk melihat kesiapan Unit Organisasi BPOM terhadap 2 (dua) Unit Kerja Pusat, yang terdiri dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

- Audit Sertifikasi Stage 2 QMS ISO 9001:2015 berupa audit lapangan (on-site) terhadap 2 (dua) Unit Kerja Pusat.
- Audit Resertifikasi QMS ISO 9001:2015 berupa audit lapangan (on-site) terhadap 3 (tiga) unit organisasi yang terdiri atas 1 (satu) Balai POM di Mamuju dan 2 (dua) Loka POM Kabupaten/Kota yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang
- Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015 berupa:
  - ✓ Audit lapangan (on-site) terhadap 1 (satu) Balai POM di Tarakan dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM Kabupaten/Kota
  - ✓ Remote audit terhadap 1 (satu) Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, dan 32 (tiga puluh dua) Balai Besar/Balai POM.

**d. Pemantauan Kinerja Penyedia Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 pada UPT BPOM**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Surveilans ISO 9001:2015 BPOM Nomor PL.02.03.251.022.06.22.1584 pada tanggal 21 Juni 2022 telah ditetapkan PT. Sucofindo sebagai penyedia eksternal pada Pengadaan Surveilans ISO 9001:2015 BPOM Tahun Anggaran 2022. Agenda pelaksanaan kegiatan audit eksternal dilakukan dari tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 23 September 2022. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh PT. Sucofindo terhadap beberapa unit kerja di lingkungan BPOM. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitoring pelaksanaan audit eksternal ISO 9001:2015 BPOM di UPT BPOM yang dilakukan secara *on site audit* dan *remote audit* oleh PT. Sucofindo sebagai penyedia jasa terkait pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan Kinerja Penyedia Audit Eksternal ISO 9001:2015 pada UPT BPOM dilakukan sebanyak 4 kali di UPT BPOM yaitu Loka POM di Kabupaten Bogor (22 Juli 2022), Loka POM di Kota Sungai Penuh (9 Agustus 2022), Balai Besar POM di Bandar Lampung (31 Agustus 2022) dan Balai POM di Kendari (14 September 2022). Diharapkan dari hasil evaluasi ini menjadi masukan untuk penyedia dalam pelaksanaan kegiatan audit eksternal QMS tahun depan.

## X. Kerjasama Internasional

### 1. Badan POM Dan SMESCO Jalin Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM di Bidang Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Olahan

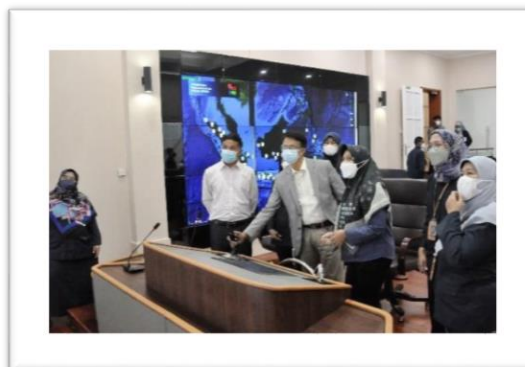
Badan POM dan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP KUKM), atau yang biasa disebut SMESCO, berkolaborasi melakukan kerja sama untuk mendukung penuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kerja sama ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan POM dan Smesco di Gedung Smesco Indonesia, Selasa 6 September 2022. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghasilkan produk obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan yang aman dan bermutu, sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan. Badan POM berharap SMESCO dapat mendukung UMKM ketiga komoditi tersebut dari sisi digitalisasi, promosi, pemasaran, serta permodalan agar UMKM masuk dalam ekosistem digital.



### 2. Learning Visit Department Of Drug Administration (DDA) Nepal di Badan POM

Badan POM telah menyelenggarakan Program Learning Visit pejabat Department of Drug Administration (DDA) Nepal selama 6 (enam) hari kerja pada tanggal 22 – 29 Agustus 2022, yang difasilitasi oleh US Agency for International Development (USAID) The Medicines, Technologies, and Pharmaceutical Services (MTaPS) Indonesia. Rangkaian dalam kegiatan Learning Visit tersebut meliputi:

- Site visit ke BPOM Operational Center (BOC), Gedung Pelayanan Publik, dan Laboratorium PPPOMN;
- Courtesy Call kepada Kepala Badan POM;



- c. Pemaparan materi dan diskusi dengan Kedeputian I, Kedeputian II, PPPOMN, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- d. Pembahasan draft MoU;
- e. Kunjungan ke industri farmasi (PT Kalbio Global Medika).

Dalam kesempatan tersebut, pihak Nepal menyampaikan tujuan kedatangan adalah dalam rangka mempelajari dan memperoleh sharing informasi dan pengalaman dari Badan POM terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi fungsi-fungsi regulatori sesuai WHO GBT Assessment. Hal ini mengingat Badan POM merupakan NRA yang telah memperoleh maturity level 3-4 dalam WHO NRA Benchmarking, bahkan telah masuk dalam transitional WHO Listed Authorities (WLA).

### 3. Kerja Sama Selatan - Selatan (KSS) Badan POM Untuk Timor Leste Tahun 2022

Badan POM telah menyelenggarakan program KSS bagi AIFAESA, I.P Timor Leste pada tanggal 19 - 27 September 2022 di Kupang. Sebagai bentuk komitmen Badan POM untuk membantu Timor Leste dalam meningkatkan kapasitas di bidang pengawasan pangan (khususnya pengujian pangan), Badan POM telah menyelenggarakan program KSS kepada Timor Leste sejak tahun 2018. Pada tahun ini Badan POM RI melanjutkan KSS Badan POM untuk Timor-Leste dalam bentuk Pelatihan dan Pengujian Sampel Autoridade Inspeção no Fiskalizasaun Atividade Económica, Sanitária no Alimentár (AIFAESA), I.P Timor- Leste.



Kegiatan KSS Timor Leste diikuti oleh 4 (empat) pengawas pangan dari AIFAESA, I.P dengan narasumber dari PPPOMN, Direktorat Pengawasan, Peredaran Pangan Olahan dan Balai POM di Kupang. Materi pelatihan antara lain cara berlaboratorium yang baik, pengenalan teknik sampling, pengenalan produk dan jenis pengujian Kimia pangan dan mikrobiologi. Dalam merespon isu pengawasan beras, telur, minuman beralkohol dan AMDK lokal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Timor-Leste, peserta juga melakukan praktek pengujian di laboratorium Balai POM di Kupang. Selain praktek di Laboratorium, peserta juga melakukan simulasi on site sampling pangan di sarana peredaran

Dalam rangka keberlanjutan program KSS Timor Leste di tahun 2023, saat ini Sekretariat Utama cq Biro Kerja Sama dan Humas tengah melakukan upaya pemberian hibah berupa peralatan laboratorium kepada

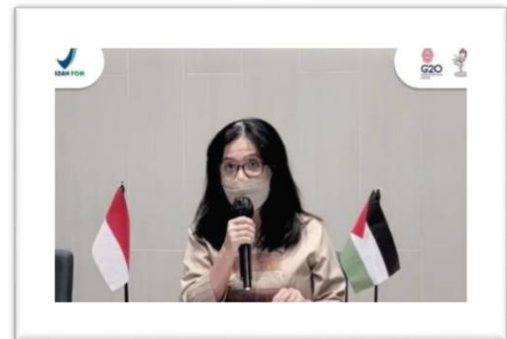
AIFAESA, I.P. atas dukungan Kementerian Luar Negeri dan LDKPI, Kementerian Keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi fasilitas pengujian laboratorium pangan di Timor-Leste dan mendukung peningkatan kapasitas pengawasan pangan di Timor-Leste.

#### 4. **Kerja Sama Selatan - Selatan (KSS) Badan POM Untuk Palestina Tahun 2022**

Badan POM telah menyelenggarakan program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina secara virtual di Jakarta, Indonesia dan Ramallah, Palestina pada tanggal 20 – 22 September 2022. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen Badan POM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator.

Badan POM telah memberikan bantuan teknis kepada Palestina dalam bentuk pelatihan/capacity building selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pemberian bantuan teknis yang dilakukan melalui kerangka KSS ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas regulator obat di Palestina dalam memastikan produk yang diedarkan di Palestina merupakan produk yang aman, berkhasiat dan berkualitas baik.

Kegiatan KSS Palestina diikuti oleh 26 (dua puluh enam) peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina dengan materi pelatihan dibidang Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Pangan Olahan dan Laboratorium. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan peserta memberikan apresiasi kepada Badan POM karena memiliki regulasi yang kuat dan prosedur yang jelas sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara efektif. Pemberian ilmu dan pengalaman Badan POM dalam Clinical Trial, GMP, serta export import licensing juga bermanfaat untuk membangun NRA Palestina. Selain itu, peserta juga memberikan apresiasi terhadap digitalisasi sistem pengawasan Obat dan Makanan Badan POM dan manfaatnya dalam melakukan track and trace serta pelaporan informasi. Dalam rangka keberlanjutan program KSS Palestina di tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Humas tengah melakukan upaya percepatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan Palestina.



## **XI. Sumber Daya Manusia**

### **1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pada triwulan III ini telah terlaksananya pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Kementerian PAN RB terkait jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, pengusulan evaluasi jabatan fungsional Perencana Utama, Analis Kebijakan Utama, Arsiparis Utama, dan Auditor Pertama sampai dengan Utama. Selain itu telah dilakukan pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertujuan untuk mengetahui PPNPS yang memenuhi persyaratan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (CPPPK).

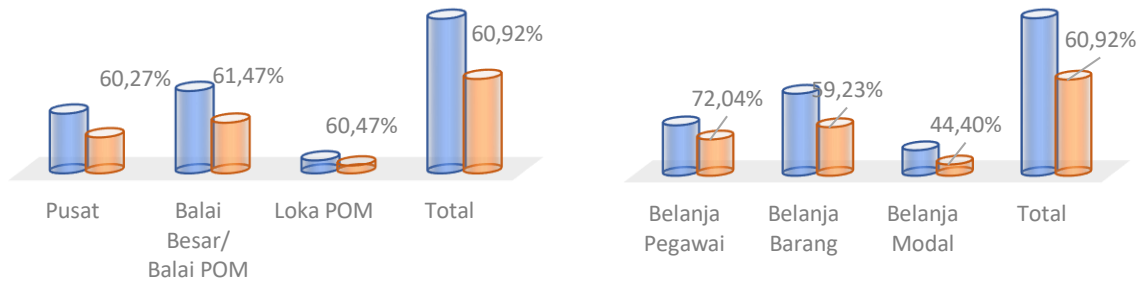
### **2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) merupakan platform pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS memiliki fitur online shopping training atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi online yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat online di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

BPOM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk sharing data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Sampai dengan bulan September 2022, sebanyak 4.835 data/informasi/pengetahuan telah diunggah dalam aplikasi.

## **XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan III 2022**

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.244.003.351.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp 1.367.056.970.890,- (60,92%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp 520.884.587.397,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp 733.111.542.858,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp 113.060.840.635,-.



**Gambar 26. Realisasi Anggaran s.d Triwulan III 2022**

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
<b>Pagu</b>	716.347.258.000	1.165.204.742.000	362.451.351.000	2.244.003.351.000
<b>Realisasi</b>	516.028.285.486	690.109.962.858	160.918.722.546	1.367.056.970.890
<b>%</b>	72,04%	59,23%	44,40%	60,92%

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
<b>Pusat</b>	864.316.057.000	520.884.587.397	60,27%
<b>Balai Besar/ Balai POM</b>	1.192.729.400.000	733.111.542.858	61,47%
<b>Loka POM</b>	186.957.894.000	113.060.840.635	60,47%
<b>Total</b>	2.244.003.351.000	1.367.056.970.890	60,92%

### **XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2022. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagaimana terlampir pada buku ini.

## **PENUTUP**

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.



# **LAMPIRAN I**

**CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN III**



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92,25	%	87,95	95,34%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	%	89,10	107,35%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,5	%	84,95	95,99%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77,5	%	86,79	111,99%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	%	84,79	95,27%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	91,04	100,04%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	65	%	58,55	90,08%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	88,23	96,96%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60	%	55,95	93,26%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	66	%	71,71	108,65%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,28	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	%	progres 79,34%	
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	Nilai	91,7	98,60%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2.010	Sekolah	Progres 71,27%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	648	Desa	Progres 74,75%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	255	Pasar	Progres 82,29%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	78,73	78,73%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	78,22	78,22%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	73	%	66,4	90,96%
		Indeks RB UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	82	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	81	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks	2,39	106,22%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5	Nilai	76,49	81,81%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	84	%	76,47	91,04%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	80	%	100	125,00%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	87,5	%	77,19	88,22%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	92	%	100	108,70%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	83,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	90	Nilai	90	100,00%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	80	%	77,78	97,23%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	80	%	87,59	109,49%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	80	%	73,33	91,66%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	60	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	80,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	90	%	75	83,33%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	83	%	93,62	112,80%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	76	%	77,91	102,51%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	84	%	100	119,05%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	79	%	93,37	118,19%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76	%	80,35	105,72%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106,38%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	62	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	90	100,00%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,45	Indeks	4,65	104,49%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2,26	Indeks	3	132,74%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	99	100,00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	57	%	52,33	91,81%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	13	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89	%	91,13	102,39%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	80	%	75	93,75%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	85	%	85,85	101,00%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	100	112,36%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,3	Indeks	4,61	107,21%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91	%	92	101,10%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	71,17	81,80%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	87,03	100,03%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85	%	98,63	116,04%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84.50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87	%	87,53	100,61%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	83	%	84,66	102,00%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	%	96,97	107,74%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92	%	93,73	101,88%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,51	Indeks	4,66	133,33%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	90	90,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	90	Indeks	90,73	100,81%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	86	%	87,27	101,48%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	86	%	90,7	105,47%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	80	%	75,45	94,31%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	86	%	98,31	114,31%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,2	Indeks	4,61	109,76%
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	75	%	81,75	109,00%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan	80	Indeks	72,85	91,06%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		ONPP				
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,26	Indeks	2,5	110,62%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	94,6	107,50%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	88	Indeks	90,9	103,30%
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	48	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,51	Indeks	4,45	98,67%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18100	%	14588	80,60%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	74	Permohonan	72,79	98,36%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	92,59	%	93,07	100,52%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	75,51	107,87%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	57,97	66,63%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60400	Label dan Iklan	50980	84,40%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	%	100	102,04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	75	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	69	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	350	sarana	532	152,00%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	94	%	93,43	99,39%
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi	82	%	72,95	88,96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		peraturan peredaran pangan olahan yang baik				
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,51	Indeks	4,89	108,43%
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	52080	77,73%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	93	%	90,32	97,12%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	60	%	91,3	152,17%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	90	%	74,88	83,20%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	55,56	58,48%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	76	%	78,18	102,87%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	88	%	90,4	102,73%
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76	%	72,73	95,70%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produksi Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	75	%	71,59	95,45%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	Indeks	4,54	113,22%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	70	%	66,67	95,24%
		Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	80	Indeks	80,59	100,74%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,26	Indeks	3	132,74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	%	100	105,26%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	83,81	93,12%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	96,10	101,16%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,65	%	4,79	103,01%
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Indeks	77,51	86,12%
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	94	%	92,24	98,13%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,26	Indeks	2,5	110,62%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98	%	90	91,84%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89	%	77,39	86,96%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	76	%	57,50	75,66%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	70,57	92,86%
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4.20	Indeks	4,51	107,38%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	84	%	64	76,19%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	88.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,25	Indeks	2	88,89%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	94	%	100	106,38%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,5	%	92,38	98,80%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82,5	%	93,97	113,90%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	74	%	81,67	110,36%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4,45	Indeks	4,79	107,64%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82,5	%	86,82	105,24%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	77	%	93,14	120,96%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	85	%	85,77	100,91%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2,25	%	2,75	122,22%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	%	90	92,78%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	95,5	%	80	83,77%
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	91	%	108	118,68%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,25	%	99	103,94%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	Indeks	3	109,09%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	93	%	57,94	62,30%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	91,65	101,83%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84	%	86,67	103,18%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	98,41	109,34%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45	Indeks	4,51	101,35%
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	90	90,00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	89	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	89	%	79,46	89,28%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	87,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	92	92,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	70	%	39,87	56,96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87,5	Indeks	91	104,00%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	%	71	74,74%
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	240	UMK	200	83,33%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,81	Indeks	4,68	122,83%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	Pemda	201	62,42%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	500	Kader/fasilitator	434	86,80%
		Tingkat efektivitas KIE makanan	93,56	%	93,10	99,51%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,26	Indeks	2,75	121,68%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	75	81,52%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	81	%	77,65	95,86%
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	20	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPOMN	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	%	80,16	97,05%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5	%	79,05	96,99%
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	77,74	77,74%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	97,84	105,20%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,3	Indeks	4,77	110,93%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	71	%	64,29	90,55%
		Indeks RB PPPOMN	87.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	78.7	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status Akreditasi	71	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	nilai	69,06	73,39%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	68	%	53,42	78,56%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	82	%	73,53	89,67%
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	80	%	83,33	104,16%
		Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	49	%	45,45	92,76%
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	60	%	60	100,00%
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	60	%	49,69	82,82%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	63.8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2,26	Indeks	2	88,50%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90	%	100	111,11%
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan	78,1	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	nilai	56,82	62,23%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	81	Indeks	91,01	112,36%
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK, dan Kosmetik	50	%	58,33	116,66%
		Persentase Duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84	%	94,89	112,96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76	%	80	105,26%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50	%	75	150,00%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat	60	%	100	166,67%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha	60	%	71,92	119,87%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard	95	%	50,68	53,35%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard	95	%	78,72	82,86%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19	%	94,81	100,66%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01	Indeks	4,06	101,25%
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	komunitas	260	94,89%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1	Indeks	3	142,86%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	64,33	64,98%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	87,67	105,63%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	78	%	79,99	102,55%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	90,78	109,37%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	88	%	92,26	104,84%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,25	Indeks	2	88,89%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	%	75	84,27%
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	33,21	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Nilai	88,4	94,55%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	86	%	70,41	81,87%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	1	50,00%
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	%	81,9	98,67%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100	111,11%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	%	99,97	100,13%
		Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	86	%	70,73	82,24%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	%	77,91	118,05%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	%	98,14	103,31%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	%	70,08	81,49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3,85	Indeks	3,83	99,48%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	Nilai	83,31	87,69%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	Nilai	76,44	80,28%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	75	75,00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	Indeks	3,48	91,10%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	%	52,24	73,54%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	66,96	66,96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	46	46,00%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	%	89,11	106,72%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	95	95,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan PerundangAkhir Tahunundangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,5	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5,47	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	Indeks	3,75	100,00%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	80,93	80,93%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4	%	99,4	100,00%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	%	94,62	100,26%
		Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks	4,90	107,69%
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	%	85	89,01%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0.89)	Indeks	0,94	105,62%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,44	Indeks	3,55	103,20%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	59,55	79,40%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	%	99,80	108,48%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Biro SDM	83,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	95	95,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	79	%	81,93	103,71%
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	875	SDM	822	93,94%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	60	%	38,2	63,67%
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	82	Kerja Sama	65	79,27%
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,45	Nilai	4,63	104,04%
		Persentase SDM POM yang meningkatkan pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	92	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	50	%	50,9	101,80%
		Nilai kepuasan Layanan PFM	4	Nilai	4,43	110,75%
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	88	Nilai	57	64,77%
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	84	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2,26	Indeks	2,50	110,62%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	93,5	Nilai	89,92	96,17%
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	94	%	88	93,62%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,4	Indeks	3,4	100,00%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	%	97,06	102,17%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	31	%	32,7	105,48%
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	3,6	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	80	%	77,05	96,31%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	15	%	12	80,00%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	78,26	78,26%
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70	Nilai	63,72	91,03%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	70,97	70,97%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,4	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	Indeks	3	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	50	%	43,09	86,18%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,6	Nilai	87,16	93,12%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,2	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata-rata Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja di Wilayah Inspektorat I	3	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra kerja Inspektorat I	99,01	%	99,91	100,91%
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	94,40	101,51%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Sejak TW III sudah tidak dilakukan perhitungan	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
					lagi (sesuai dengan perubahan renstra terbaru)	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	94	%	91,10	96,91%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	90,91	90,91%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	98,88	106,32%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	100	%	63,52	63,52%
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat I	78	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	87,15	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	90	Indeks	75	83,33%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	5,67	94,19%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	8,47	97,81%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	3,64	91,00%
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat II	99,01	%	99,96	100,96%
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat II				
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	94	%	87,72	93,32%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	100	100,00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	95,93	103,15%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	96,89	96,89%
		Indeks RB Inspektorat II	85,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25		3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	90	%	75	83,33%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset	2.93	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	66,67	66,67%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	Persen	75,34	85,61%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	Persen	86,75	173,50%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	Persen	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Umum	83.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	%	75	83,33%

# **LAMPIRAN II**

**SERAPAN ANGGARAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**SAMPAI DENGAN**

**TRIWULAN III**

**SUMBER: APLIKASI OMSPAN**

**(Per 31 September 2022)**

## A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan</b>	<b>410.246.161.000</b>	<b>249.582.141.196</b>	<b>60,84%</b>
1.1	Biro Kerjasama	15.608.438.000	6.809.393.373	<b>43,63%</b>
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	22.298.642.000	12.680.509.594	<b>56,87%</b>
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	14.408.276.000	8.552.854.561	<b>59,36%</b>
1.4	Biro Umum	165.256.790.000	86.600.651.080	<b>52,40%</b>
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	192.674.015.000	134.938.732.588	<b>70,03%</b>
<b>2</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif</b>	<b>52.328.994.000</b>	<b>34.299.902.836</b>	<b>65,55%</b>
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	8.153.558.000	5.177.999.361	<b>63,51%</b>
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	11.740.547.000	7.372.016.861	<b>62,79%</b>
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	11.306.322.000	7.383.709.091	<b>65,31%</b>
2.4	Dit. Registrasi Obat	11.610.084.000	8.037.069.816	<b>69,22%</b>
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	9.518.483.000	6.329.107.707	<b>66,49%</b>
<b>3</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</b>	<b>50.004.587.000</b>	<b>32.953.600.944</b>	<b>65,90%</b>
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	11.274.111.000	7.288.185.962	<b>64,65%</b>
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	9.287.950.000	6.415.327.860	<b>69,07%</b>

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10.400.772.000	6.702.252.074	<b>64,44%</b>
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6.798.182.000	4.701.416.118	<b>69,16%</b>
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.243.572.000	7.846.418.930	<b>64,09%</b>
<b>4</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>	<b>58.694.540.000</b>	<b>34.934.841.669</b>	<b>59,52%</b>
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	14.850.000.000	8.759.721.313	<b>58,99%</b>
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	12.834.540.000	7.613.172.660	<b>59,32%</b>
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	8.568.000.000	5.865.981.300	<b>68,46%</b>
4.4	Dit. Standdrisasi Pangan Olahan	8.442.000.000	4.697.204.411	<b>55,64%</b>
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	14.000.000.000	7.998.761.985	<b>57,13%</b>
<b>5</b>	<b>Deputi Bidang Penindakan</b>	<b>44.708.170.000</b>	<b>30.575.457.706</b>	<b>68,39%</b>
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	19.629.793.000	14.309.526.010	<b>72,90%</b>
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	7.482.810.000	5.166.051.154	<b>69,04%</b>
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	7.783.087.000	4.601.278.168	<b>59,12%</b>
5.4	Dit. Cegah Tangkal	9.812.480.000	6.498.602.374	<b>66,23%</b>
<b>6</b>	<b>Inspektorat Utama</b>	<b>28.651.275.000</b>	<b>17.981.455.643</b>	<b>62,76%</b>
6.1	Inspektorat I	21.616.230.000	13.405.714.942	<b>62,02%</b>
6.2	Inspektorat li	7.035.045.000	4.575.740.701	<b>65,04%</b>
<b>7</b>	<b>Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional</b>	<b>87.381.187.000</b>	<b>45.161.104.084</b>	<b>51,68%</b>
<b>8</b>	<b>Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</b>	<b>23.192.834.000</b>	<b>10.170.748.903</b>	<b>43,85%</b>
<b>9</b>	<b>Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan</b>	<b>55.931.836.000</b>	<b>32.526.225.615</b>	<b>58,15%</b>

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	53.176.473.000	32.699.108.801	61,49%
	<b>TOTAL SATKER PUSAT</b>	<b>864.316.057.000</b>	<b>520.884.587.397</b>	<b>60,27%</b>

## B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Mataram	30.114.223.000	21.561.988.883	71,60%
2	Sofifi	19.194.201.000	13.076.198.903	68,13%
3	Gorontalo	20.761.657.000	13.661.338.779	65,80%
4	Palembang	31.471.608.000	22.207.907.148	70,56%
5	Bengkulu	29.694.200.000	19.403.392.804	65,34%
6	Banda Aceh	26.753.775.000	17.582.739.773	65,72%
7	Tarakan	9.697.697.000	7.084.254.391	73,05%
8	Palu	27.108.390.000	18.188.891.629	67,10%
9	Manado	33.127.542.000	22.218.828.741	67,07%
10	Semarang	56.361.595.000	37.541.319.771	66,61%
11	Jambi	31.251.919.000	21.280.907.258	68,09%
12	Surabaya	57.628.307.000	38.102.168.458	66,12%
13	Samarinda	32.711.174.000	20.293.398.463	62,04%
14	Denpasar	43.306.988.000	27.505.005.853	63,51%
15	Jakarta	47.160.455.000	29.771.335.907	63,13%
16	Pekan Baru	36.833.496.000	23.211.743.873	63,02%
17	Bandar Lampung	35.046.074.000	22.195.501.838	63,33%
18	Serang	28.942.153.000	18.269.495.407	63,12%
19	Yogyakarta	41.563.606.000	25.974.713.964	62,49%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
20	Kupang	35.525.912.000	21.484.384.345	60,48%
21	Bandung	63.324.231.000	40.295.581.767	63,63%
22	Kendari	29.870.013.000	19.456.484.917	65,14%
23	Mamuju	22.731.603.000	13.939.601.038	61,32%
24	Padang	45.076.660.000	27.864.081.177	61,81%
25	Palangkaraya	27.777.127.000	15.792.268.215	56,85%
26	Medan	49.212.860.000	30.677.995.720	62,34%
27	Jayapura	29.337.839.000	16.479.708.217	56,17%
28	Ambon	24.697.125.000	14.271.906.969	57,79%
29	Pangkal Pinang	21.903.923.000	11.458.257.856	52,31%
30	Makassar	57.917.332.000	32.692.757.601	56,45%
31	Pontianak	27.547.955.000	14.961.487.636	54,31%
32	Manokwari	22.780.036.000	12.390.694.574	54,39%
33	Batam	32.827.880.000	18.090.156.340	55,11%
34	Banjarmasin	63.469.844.000	24.125.044.643	38,01%
	<b>TOTAL SATKER BALAI</b>	<b>1.192.729.400.000</b>	<b>733.111.542.858</b>	<b>61,47%</b>

### C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kota Dumai	5.140.801.000	3.685.078.371	71,68%
2	Kabupaten Tanah Bumbu	3.571.685.000	2.575.328.767	72,10%
3	Kabupaten Pulau Morotai	3.264.570.000	2.322.167.944	71,13%
4	Kabupaten Sanggau	3.717.837.000	2.595.868.823	69,82%
5	Kota Sungai Penuh	3.932.813.000	2.840.656.194	72,23%
6	Kabupaten Belitung	3.368.757.000	2.403.054.781	71,33%
7	Kabupaten Kotawaringin Barat	4.182.867.000	2.860.131.633	68,38%
8	Kabupaten Indragiri Hilir	4.392.165.000	2.946.342.719	67,08%
9	Kabupaten Ende	5.494.760.000	3.715.037.018	67,61%
10	Kabupaten Banyumas	5.974.307.000	3.985.413.977	66,71%
11	Kabupaten Aceh Tengah	6.837.833.000	2.968.620.441	43,41%
12	Kota Surakarta	5.354.606.000	3.527.277.331	65,87%
13	Kota Palopo	5.018.555.000	3.216.783.616	64,10%
14	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.606.135.000	2.411.859.963	66,88%
15	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4.297.659.000	2.685.236.888	62,48%
16	Kabupaten Tangerang	4.886.266.000	3.168.641.976	64,85%
17	Kabupaten Bogor	5.625.902.000	3.688.506.581	65,56%
18	Kabupaten Kediri	4.635.361.000	2.942.611.247	63,48%
19	Kota Baubau	5.459.952.000	3.333.137.357	61,05%
20	Kota Tanjungbalai	3.376.293.000	2.152.425.775	63,75%
21	Kabupaten Bima	4.177.562.000	2.522.136.089	60,37%
22	Kabupaten Jember	4.059.282.000	2.632.572.861	64,85%
23	Kota Tanjungpinang	4.150.057.000	2.535.362.198	61,09%
24	Kota Tasikmalaya	6.346.508.000	3.850.283.968	60,67%
25	Kabupaten Tulangbawang	4.603.945.000	2.274.871.256	49,41%
26	Kabupaten Merauke	3.690.198.000	2.237.685.266	60,64%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
27	Kabupaten Sorong	5.423.941.000	2.751.027.063	50,72%
28	Kabupaten Mimika	5.108.916.000	3.139.635.084	61,45%
29	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	5.751.256.000	3.666.618.420	63,75%
30	Kabupaten Aceh Selatan	7.671.026.000	3.207.016.753	41,81%
31	Kota Balikpapan	4.280.053.000	2.635.423.793	61,57%
32	Kabupaten Banggai	3.576.975.000	2.164.915.055	60,52%
33	Kabupaten Dharmasraya	3.508.113.000	2.191.801.927	62,48%
34	Kabupaten Rejang Lebong	4.898.039.000	2.849.987.880	58,19%
35	Kota Payakumbuh	7.217.633.000	3.075.546.017	42,61%
36	Kota Lubuklinggau	4.467.806.000	2.573.257.754	57,60%
37	Kabupaten Manggarai Barat	4.564.470.000	2.522.466.365	55,26%
38	Kabupaten Buleleng	7.341.605.000	4.162.040.168	56,69%
39	Kabupaten Toba Samosir	3.981.385.000	2.044.011.316	51,34%
	<b>TOTAL SATKER LOKA</b>	<b>186.957.894.000</b>	<b>113.060.840.635</b>	<b>60,47%</b>
	<b>TOTAL SELURUH SATKER</b>	<b>2.244.003.351.000</b>	<b>1.367.056.970.890</b>	<b>60,92%</b>



**KINERJA BPOM  
DALAM ANGKA TRIWULAN III  
TAHUN 2022**



Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



Bpom RI